

**KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORATJENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN  
JALAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XV  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

<sup>1</sup>Romi Firdhani, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al – Banjary Banjarmasin, NPM 17120182

<sup>2</sup>Drs. Fakhsiannoor, M.Si, M.Kes, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al – Banjary Banjarmasin, NIDN 1120106301

<sup>3</sup>Beni Akhmad, S.AP, M.AP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al – Banjary Banjarmasin, NIDN 1109089201

**ABSTRAK**

Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang optimal dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, perlu dilakukan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan dalam rangka memberikan cakupan yang lebih luas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan kepentingan umum dan kepentingan masyarakat. kemampuan masyarakat. Oleh karena itu, peran Kementerian Perhubungan, Ditjen Perhubungan Darat, Pusat Pengelola Perhubungan Darat Wilayah XV, Provinsi Kalimantan Selatan sangat penting dalam hal mobilitas kendaraan di Kota Banjarmasin, terutama mengenai kemacetan lalu lintas akibat pesatnya perkembangan kota. kota. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka hasil datanya akan fokus pada pertanyaan deskriptif dan tidak menguji hipotesis serta tidak mengkorelasikan variabel. Hasil Riset Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2020 dapat dikatakan cukup baik. Meskipun pelaksanaan program kerja yang telah ditentukan tidak selalu berhasil dan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan dapat dikatakan cukup baik. Namun masih terdapat faktor yang menjadi kendala dalam

peningkatan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan.

**Kata Kunci : Kinerja, Kemetrian, Perhubungan, Transportasi, Kalimantan Selatan**

### **ABSTRACT**

*In order to achieve optimal efficiency and usability in the implementation of road traffic and transportation, it is necessary to carry out continuously and continuously improve so that the coverage is wider and services are evenly distributed to the community by taking into account the public interest and the community's capabilities. Therefore, the role of the Ministry of Transportation and the Directorate General of Land Transportation of the Land Transportation Management Center for Region XV of South Kalimantan Province is very important in terms of vehicle mobility in the City of Banjarmasin, especially regarding traffic congestion due to the increasingly rapid development of the city. The research approach used in this research is research with a qualitative approach. Because this research uses a qualitative approach, the results of the data will be focused in the form of descriptive questions and do not examine a hypothesis and do not correlate the variables. The results of the Research on the Performance of the Land Transportation Management Center for Region XV of South Kalimantan Province during 2020 can be said to be quite good. Although the implementation of the work program that has been determined is not always successful and the performance of the Land Transportation Management Center for Region XV South Kalimantan Province can be said to be quite good. However, there are still factors that become obstacles in improving the performance of the Land Transportation Management Center for Region XV, South Kalimantan Province.*

**Keywords:** Performance, Ministry of Transportation, Transportation, South Kalimantan

### **PENDAHULUAN**

Tata pemerintahan yang baik merupakan hal penting pada sektor organisasi publik. Tata pemerintahan yang baik pada sektor publik belum tentu menjamin kinerja pemerintah juga akan baik pada suatu Negara. Hal tersebut tergantung kepada kebijakan pemerintah dalam menentukan arah pembangunan suatu negara.

Sebuah organisasi publik dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat harus selalu mengevaluasi kinerjanya. Baik dan buruknya suatu kinerja dari organisasi publik dapat dilihat dari kinerja organisasi tersebut dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat yang membutuhkan, hasil yang dicapai, dan sebagainya. Dengan demikian, jika terdapat kekurangan, dapat diperbaiki dan dapat memberikan dorongan atau memberikan dukungan kinerja yang sudah baik. Dengan adanya evaluasi tersebut, dapat diketahui seberapa optimalkah sebuah organisasi publik dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat.

Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebuah unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas angkutan jalan. Transportasi memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam ikut mendorong dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan daerah terutama keterkaitan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat (*publik service*), penunjang kegiatan ekonomi daerah, dan salah satu potensi pendapatan daerah. Salah satu bidang transportasi yang memerlukan perhatian lebih yakni transportasi darat karena sebagian besar aktivitas manusia berada di darat.

Khusus untuk lalu lintas, merupakan masalah yang sangat kompleks mengingat perkembangan Kota Banjarmasin yang pesat. Perkembangan kota Banjarmasin dapat dilihat dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota terutama pembangunan fisik seperti jalan, gedung, pusat perbelanjaan, dan industri. Dengan adanya perkembangan kota yang cukup pesat, maka juga berpengaruh terhadap meningkatnya arus lalu lintas di jalan raya.

Penanganan masalah kelancaran arus lalu lintas merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Dalam hal ini adalah menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi

Kalimantan Selatan, khususnya Seksi lalu lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki tugas mengatur lalu lintas agar arus lalu lintas dapat berjalan dengan lancar.

Kinerja Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan, khususnya seksi lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlihat dari kelancaran arus lalu lintas yang ada di wilayah kerjanya. Saat ini, Kota Banjarmasin merupakan kota dengan jumlah penduduk yang cukup padat, sehingga dengansendirinya juga berpengaruh terhadap kepadatan arus lintas. Hal ini sesuai dengan salah satu sasaran dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu terwujudnya sistem manajemen transportasi lalu lintas yang baik sehingga dapat tercapai kelancaran arus lalu lintas.

Citra pelayanan organisasi publik pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan. mengalami penurunan kepercayaan masyarakat dalam hal penanganan daerah rawan kecelakaan yaitu minimnya fasilitas keselamatan jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan dan alat penerangan jalan. karena itu, untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat diperlukan pengkajian dan pengembangan kinerja sehingga kinerja organisasi dapat optimal. Hal ini perlu dilakukan karena seiring dengan tuntutan masyarakat atas pelayanan yang berkualitas, maka organisasi publik harus mengubah citra kinerjanya agar menjadi lebih baik. Dengan demikian akan dapat memenuhi harapan-harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, maka perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan merata pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesarbesarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat. Oleh karenaitu, peranan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan

Selatan sangat penting sekali dalam hal mobilitas kendaraan di Kota Banjarmasin, terutama mengenai kemacetan lalu lintas akibat dari perkembangan kota yang semakin pesat.

## **ALAT DAN METODE**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil data akan difokuskan berupa pertanyaan secara deskriptif dan tidak mengkaji suatu hipotesa serta tidak mengkorelasi variabel. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai kinerja seksi lalu lintas dan angkutan jalan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknis analisis data menggunakan analisis univarian bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (*validitas internal*), uji dependabilitas (reliabilitas) data, uji transferabilitas (*validitas eksternal/ generalisasi*), dan uji konfirmabilitas (*obyektivitas*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Deskripsi Wilayah Penelitian**

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan di wilayah Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar dengan luas areal  $\pm$  5 hektar dan luas bangunan Gedung 5.848 m<sup>2</sup>, berdiri di atas lahan gambut. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk pada tanggal 30 Desember tahun 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, dengan dipimpin oleh Kepala Balai dibantu oleh 1 orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 3 orang Kasi yaitu Kasi Sarana dan Prasarana Transportasi Darat, Kasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kasi Transportasi SDP Komersil dan Perintis.

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi

Kalimantan Selatan dibentuk untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan komersial dan perintis.

## 2. Kinerja Organisasi

Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan dapat terlihat dari kelancaran arus lalu lintas yang ada di wilayah kerjanya. Di wilayah Kota Banjarmasin dapat dilihat dari arus lalu lintas di jalan-jalan di Kota Banjarmasin. Saat ini, Kota Banjarmasin merupakan kota yang memiliki penduduk yang cukup padat, yang tentunya juga mempengaruhi kepadatan arus lalu lintas menjadi terganggu. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu menyangkut kelancaran arus lalu lintas.

Transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam mendorong dan menggerakkan pembangunan daerah, terutama sebagai sarana penunjang kegiatan perekonomian. Tujuan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan adalah terwujudnya lalu lintas angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur dan nyaman serta efisien yang mampu memadukan modal transportasi sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan sektor transportasi yang berwawasan lingkungan di Kota Banjarmasin. Hal ini dapat terlihat dari semakin padatnya lalu lintas di Kota Banjarmasin seiring dengan perkembangan perekonomian yang semakin pesat.

Dengan adanya kepadatan lalu lintas tersebut, maka Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan melakukan suatu tindakan untuk mengurai kemacetan tersebut dengan melakukan pengendalian lalu lintas. Pengendalian lalu lintas merupakan cara yang praktis dan mudah serta membutuhkan biaya yang relatif lebih murah. Dalam hal-hal tertentu teknik pengendalian lalu lintas membutuhkan biaya mahal. Hal tersebut

cenderung akibat pemanfaatan teknologi tinggi dan biaya pemeliharaan.

Agar organisasi dapat mengantisipasi berbagai tantangan dan perkembangan yang semakin sulit dan kompleks ialah harus mempersiapkan diri dan secara terus menerus melakukan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu pola yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi kepada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan membuat suatu penilaian kinerja berdasarkan pada visi, misi, dan tujuan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan. Penilaian kinerja organisasi dilakukan untuk mengetahui hasil dari program kerja yang telah ditetapkan, apakah program kerja yang ditetapkan tersebut berhasil atau tidak dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, kemudian dilakukan evaluasi kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan dari program tersebut. Setiap organisasi dalam menjalankan program kerjanya tidak selalu berhasil. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi kinerja organisasi untuk mengetahui apakah program kerja yang sudah ada akan terus dilanjutkan atau diganti dengan program kerja yang lain. Untuk itu, dapat dikatakan keberhasilan atau kegagalan suatu program kerja dapat dijadikan sebagai indikator kinerja organisasi secara keseluruhan.

### 3. Faktor penghambat dan cara mengatasi hambatan untuk meningkatkan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam setiap melakukan kegiatan organisasi tidak terlepas dari hambatan atau kendala yang mungkin ditemui selama pelaksanaan program tersebut. Hambatan atau kendala merupakan hal biasa yang ditemui dalam setiap melakukan sesuatu termasuk dalam hal ini adalah hambatan kinerja organisasi. Hambatan yang sering ditemui biasanya adalah masalah Sumber Daya Manusia, keterbatasan anggaran ataupun hambatan lainnya.

Hambatan yang dihadapi oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan adalah masalah sumber daya

manusia, keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, dan sering hilangnya sarana dan prasarana lalu lintas, dalam hal ini adalah rambu-rambu lalu lintas. Hambatan-hambatan ini merupakan hambatan yang biasa ditemui oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan berkaitan dengan kinerja organisasi.

Dengan adanya hambatan tersebut, maka pihak Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan juga melakukan suatu usaha untuk mengatasi hambatan tersebut. Setiap hambatan yang ditemui pasti ada cara-cara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengatasi hambatan yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan melakukan usaha-usaha untuk mengatasi hambatan yang ada. Adapun usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah meningkatkan sumber daya manusia dengan mengirim pegawai untuk mengikuti diklat-diklat teknis kelalulintasan, melakukan koordinasi dengan instansi lain, misalnya kepolisian dalam menindak pelanggaran lalu lintas, melakukan optimalisasi pelayanan dan pengendalian lalu lintas, dan optimalisasi sarana dan prasarana yang ada.

Peranan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan sangat penting sekali dalam hal mobilitas kendaraan di Kota Banjarmasin, terutama mengenai kemacetan lalu lintas akibat dari perkembangan kota yang semakin pesat. Kinerja dari Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan dapat dikatakan telah efektif. Namun demikian, tetap ada faktor yang menjadi penghambat dalam peningkatan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan. Hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sumber daya manusia/personil yang ada pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan dari segi kualitas belum memadai khususnya segi profesionalisme



- b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas
- c. Rambu yang dipasang sering hilang
- d. Keterbatasan anggaran

## **KESIMPULAN**

### 1. Kinerja Organisasi

Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2020 dapat dikatakan cukup bagus. Meskipun dalam pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan tidak selalu berhasil. Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan dapat diketahui berdasarkan :

#### a. Efektivitas Organisasi

Untuk memperlancar arus lalu lintas Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan melakukan beberapa tindakan, yaitu : Pemasangan lampu lalu lintas, terutama pada titik-titik persimpangan jalan, Larangan parkir pada tempat-tempat tertentu, misalnya pada ruas-ruas jalan utama yang dapat mengakibatkan kemacetan, Analisis dampak lingkungan (andalalin) perlu dilakukan mengingat perkembangan pembangunan atau pengembangan kawasan di Kota Banjarmasin sehingga harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan, salah satunya adalah mengenai analisis dampak lalu lintas.

#### b. Efisiensi Organisasi

Efisiensi keuangan menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis mengenai capaian indikator kinerja instansi.

### 2. Faktor penghambat dan cara mengatasi hambatan untuk meningkatkan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kinerja dari Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan dapat dikatakan sudah cukup baik. Namun demikian, tetap ada faktor yang menjadi penghambat dalam peningkatan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan.

Hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

- e. Sumber daya manusia/personil yang ada pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan dari segi kualitas belum memadai khususnya segi profesionalisme
- f. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas
- g. Rambu yang dipasang sering hilang
- h. Keterbatasan anggaran

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A.P Mangkunegara, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* (Cetakan Ketiga), Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Burhan Bungin, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Chaizi Nasucha, 2004, *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktek*, Jakarta, Grasindo.
- Harbani Pasolong, 2007, *Teori Administrasi Publik*, Bandung, AlfabetaLexy
- J. Moleong, 2004, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.
- Ratminto&Atik Septi, 2006, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Agus Dwiyanto, 2006, *Reformasi Birokrasi Publik di Indoesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 2007, *Analisis Data Kualitati.*, Jakarta, UI Press.
- Suyadi Prawirosentono, 1999, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan*.
- Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.
- Lembaga Administrasi Negara, 1999, *Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor : 589/IX/6/Y/99, Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Jakarta
- Ruffner, Michael dan Joaquin Sevilla, 2004, *“Public Sector Modernisation:*

*Modernising Accountability and Control*“ OECD Journal on Budgeting – Volume 4 – No.2 – ISSN 1608- 7143, [www.google.com](http://www.google.com).

Tunde, Agara dan Olarinmye Omobalji, 2009 ,“*Ethics and Accontability in Nigeria’s Public Service: An Historical Overview*“, Journal of Public Administration and Policy Research, Vol.1 (1) pp. 011-018 May.